

**REKRUTMEN KEPEMIMPINAN POLITIK PARTAI NASDEM
(Studi Kasus Penetapan Herman HN Sebagai Ketua DPW Partai NasDem)**

Skripsi

Oleh:

**ALVICKI HIDAYAT
NPM 1816021002**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**REKRUTMEN KEPEMIMPINAN POLITIK PARTAI NASDEM
(Studi Kasus Penetapan Herman HN Sebagai Ketua DPW Partai NasDem)**

Oleh

ALVICKI HIDAYAT

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik bukan hanya sebatas mencari anggota baru, melainkan juga merekrut serta mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik. Partai NasDem sebagai partai baru mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu atau citra buruk dari partai politik. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen kepemimpinan Herman HN sebagai Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung yang baru saja pindah dari PDIP. Teori yang digunakan yakni teori oligarki menurut Winters. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya oligarki partai sultanistik dalam rekrutmen kepemimpinan politik Partai NasDem. Kecenderungan tersebut merupakan salah satu strategi partai NasDem dalam mendukung Herman HN dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung tahun 2024.

Kata Kunci : Rekrutmen, Partai NasDem, Oligarki

ABSTRACT

POLITICAL LEADERSHIP RECRUITMENT OF NASDEM'S PARTY (Case Study on the Appointment of Herman HN as Chair of the NasDem Party DPW)

By

ALVICKI HIDAYAT

Political parties become a requirement in modern democratic political life. Recruitment carried out by political parties is not only for finding new members, but also recruiting and nominating the party members for public office positions. As a new party, NasDem triesn to escape the shadows of the past or the bad image of political parties. This study aimed to determine the recruitment mechanism for Herman HN's leadership as Chairman of the DPW of the NasDem Party of Lampung Province who had just moved from PDIP. The theory that used in this study is the theory of oligarchy according to Winters. This study uses a descriptive method using a qualitative approach. Data collection techniques in this study are interviews and documentation. The results of this study indicate the existence of a party oligarchy, namely sultanic in the recruitment of political leadership of the NasDem Party. This tendency is one of the strategies of the NasDem party in supporting Herman HN in the running for Governor of Lampung in 2024.

**REKRUTMEN KEPEMIMPINAN POLITIK PARTAI NASDEM
(Studi Kasus Penetapan Herman HN Sebagai Ketua DPW Partai NasDem)**

Oleh:

ALVICKI HIDAYAT

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : REKRUTMEN KEPEMIMPINAN POLITIK
PARTAI NASDEM (Studi Kasus Penetapan
Herman HN Sebagai Ketua DPW Partai
NasDem)

Nama Mahasiswa : Alvicki Hidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 1816021002

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

A blue ink signature of Dr. Robi Cahyadi Kurniawan.

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A.
NIP 197804302005011002

A blue ink signature of Lilih Muflihah.

Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P.
NIK 231602820509201

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A blue ink signature of Drs. R. Sigit Krisbintoro.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

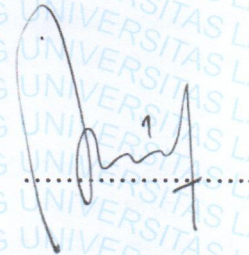
Ketua : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.



Sekretaris : Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P.



Penguji : Arizka Warganegara, Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M. Si.
NIDP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 September 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 September 2022

Membuat Pernyataan



Aivicki Hidayat
Aivicki Hidayat
NPM 1816021002

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Alvicki Hidayat, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 September 2000. Peneliti merupakan putra kedua dari Ibu Inani Asniar dan Ayah Septedi. Peneliti memiliki seorang kakak laki-laki bernama M. Naindi Ananza.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Kartika II-26 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2012, Sekolah Menengan Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 Peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama Peneliti melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non-akademik demi menunjang kapasitas diri Peneliti. Pada tahun 2018-2019 Peneliti menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Jurusan sebagai Anggota. Demikian serangkaian aktivitas Peneliti di masa perkuliahan. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha merupakan kinerja Peneliti yang bertujuan sebagai jalan menuju hidup yang lebih bermanfaat.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

(HR. Ahmad Thabrani, Daruqutni)

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya”

(Q.S An-Najm Ayat 39-40)

“Don't wish it were easier, wish you were better”

(Chief, Animal Crossing)

“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kau harus menciptakannya”

(Alvicki Hidayat)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk ...

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Inani Asniar dan Septedi

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasmu demi membesarkan putri tersayang menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Peneliti haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Rekrutmen Kepemimpinan Partai NasDem (Studi kasus Penetapan Herman HN sebagai Ketua DPW Partai NasDem)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada, tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Arif Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas segala saran, kritik, dan motivasi dan segala bimbingan yang luar biasa yang sangat membantu Peneliti dalam proses Penelitian skripsi Peneliti, sehingga skripsi Peneliti terselesaikan dengan baik. Terima kasih pak, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih pak, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan untuk membawa jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi nomor satu.
7. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Pembimbing Akademik (PA).
8. Ibu Lilih Muflihah, S.I.P., M.I.P. selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih atas segala saran, kritik, dan motivasi dan segala bimbingan yang luar biasa yang sangat membantu Peneliti dalam proses Penelitian skripsi Peneliti, sehingga skripsi Peneliti terselesaikan dengan baik. Terima kasih bu, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah ibu dan selalu diberikan kesehatan.
9. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih atas segala saran dan kritik yang luar biasa yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi Peneliti sehingga saat ini skripsi peneliti terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak pak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak beserta keluarga.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Peneliti kepada bapak dan ibu semua. Peneliti sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Peneliti.
11. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mbak Shella, Mas Juni, dan Bang Puput. Terima kasih sudah bersedia direpotkan

dalam urusan administrasi perkuliahan, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.

12. Ketua DPW Partai NasDem, Sekretaris DPW Partai NasDem, Kepala Kesekretariatan DPW Partai NasDem, Anggota Partai NasDem, dan Masyarakat. Terima kasih telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai informan dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan.
13. Kedua Orangtua tercinta, Ibu Inani Asniar dan Ayah Septedi. Terimakasih untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan peneliti insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua tetesan keringat dan do'a yang tak terhenti terpanjat untuk membesarkan putramu tersayang menjadi seseorang yang berguna sesuai harapan Ibu dan Ayah. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud, dan maaf untuk air mata yang pernah keluar atas tindakanku. Berjuta terimakasih tidak akan terbalas untuk semua jasa Ibu dan Ayah, serta ilmu yang ku dapat dari pendidikan bisa bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah bagi Ibu dan Ayah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun Ibu dan Ayah berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Ibu dan Ayah tercinta.
14. Untuk Mba Cenul, Bang Awan, Mba Zakia, Mba Hania. Mba Hania, terima kasih banyak karena berkat saran dari Mba Hania dan Mba Zakia, judul saya di *acc* oleh Pak Darma, terima kasih bang sudah banyak menginspirasi, semoga mba sehat selalu. Bang Awan, Mba Zakia, dan Mba Cenul, terima kasih banyak atas semua saran dan arahnya selama ini, maaf kalo saya sering banyak bertanya, terima kasih mba / bang semoga sehat selalu.
15. Untuk keluarga besar Rumah Teduh Tanpa Badai (Al Fadilah Syahadi, Lili Rahma Wibawati, Rafita Min Sanjaya, Ardi Ariwijaya, Wanda Yunita Sari, dan Aditya Ramadhan) Terima kasih telah kebersamai selama masa

perkuliahan dari mahasiswa baru sampai mahasiswa akhir, bersyukur bisa kenal kalian yang menjadi penyeimbang dalam mengingat antara dunia dan akhirat. Tertekan tapi ga ada aksi dan pergerakan, siapa lagi? Yap, mahasiswa akhir dengan skripsinya. Semangat ya (Rapita, Lili, dan Ardi) nyusun skripsinya, jangan malesan, satsetsatset boleh tapi jangan lupa jaga kesehatan.

16. Untuk sahabat terbaik, terkece, yang menemaniku dalam semester akhir (Fran Aris Munanda dan Al Fadilah Syahadi). Terima kasih sudah jadi bagian terbaik dicerita hidup saya, yang awalnya saya dibilang sombong dan tidak pernah mengobrol ternyata pada akhirnya menjadi teman baik yang saling berbagi cerita dan saling membantu saat ada keadaan yang sulit. Terimakasih sahabatku.

17. Untuk Ayu Nandini, Arben Setiawan, Echa Tharesa. Terima kasih telah bersedia direpotkan. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti syarat Seminar Proposal Hasil dan juga Kompre.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 September 2022

Peneliti

Alvicki Hidayat

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Oligarki	10
2.1.1 Pengertian Tentang Oligarki.....	10
2.1.2 Tipe-tipe Oligarki	13
2.2 Tinjauan tentang Kepemimpinan	16
2.3 Tinjauan Tentang Partai Politik	18
2.4 Kerangka Pikir	21
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Informan.....	26
3.4 Jenis Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Pengolahan Data	29

3.7 Teknik Analisis Data.....	29
3.8 Teknik Keabsahan Data	31
IV. GAMBARAN UMUM	33
4.1 Gambaran Umum Partai NasDem	33
4.1.1 Sejarah NasDem	33
4.1.2 Visi Misi dan Makna Logo.....	36
4.1.3 Platform Partai NasDem dan Garis Perjuangan	38
4.1.4 Platform Partai NasDem dan Garis Perjuangan	40
4.1.5 Bentuk Pendidikan Politik Partai NasDem.....	42
4.1.6 Struktur Organisasi Partai NasDem.....	43
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Hasil Penelitian	46
5.1.1 Track Record Herman HN.....	47
5.1.2 Oligarki Sultanistik.....	50
5.2 Pembahasan.....	56
5.2.1 Oligarki Sultanistik.....	57
5.2.2 Gagalnya Institusionalisme Partai Politik	67
5.2.3 Perbandingan Proses Pemilihan Ketua Partai Politik.....	70
5.2.4 Solusi Agar Tidak Terjadi Oligarki	72
VI. PENUTUP.....	74
6.1 Simpulan	74
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	8
2. Informan Penelitian.....	26
3. Struktur Organisasi Partai NasDem	43
4. Perbandingan Tahapan Pemilihan Ketua Partai Politik	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1. Kerangka Pikir	23
2. Gambar 2. Logo Partai NasDem	37
3. Gambar 3. Tipologi Oligarki dan Pertahanan Kekayaan	57

DAFTAR SINGKATAN

1. AD/ART : Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
2. Caleg : Calon Legislatif
3. DPC : Dewan Pengurus Pusat
4. DPP : Dewan Pimpinan Pusat
5. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
6. DPW : Dewan Perwakilan Wilayah
7. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. NasDem : Nasional Demokrat
9. Parpol : Partai Politik
10. PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11. Pemilu : Pemilihan Umum
12. Pilgub : Pemilihan Gubernur
13. SK : Surat Keputusan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai suatu organisasi secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat (partisipasi politik), mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai. Maka dari itu, partai politik dalam pengertian modern dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengawasi sekaligus mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.

Pengertian tersebut cenderung sejalan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Mark N. Hagopian, bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan (dalam Ichlasul Amal, 1988). Dari rumusan-rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa basis sosiologis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan.

Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai

untuk posisi jabatan publik. Rekrutmen politik juga dapat dimaknai secara luas, yakni sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna diarahkan menjadi calon-calon pemimpin dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik untuk pemilu diselenggarakan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap sertifikasi, yakni tahap pendefinisian kriteria siapa yang dapat masuk dalam pencalonan, yang meliputi aturan-aturan pemilu, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial. Kedua, tahap penominasian, mencakup ketersediaan (*supply*) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (*demand*) dari penyeleksi saat memutuskan siapa yang dinominasikan. Ketiga, tahap pemilu, yakni tahap yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu (Djojosekarto & Sandjaja, 2008: 181; Norris, 2006: 89; Sigit Pamungkas & Parlindungan, 2011: 92).

Berdasarkan pandangan Hazan dan Rahat (2006), terdapat dua pola sistem seleksi kandidat, yakni inklusif (terbuka) dan eksklusif (tertutup). Seleksi kandidat dapat dikatakan inklusif apabila syarat yang harus dipenuhi ringan sehingga terbuka bagi siapa saja, selain itu seleksi kandidat inklusif juga harus melibatkan anggota partai. Sebaliknya seleksi kandidat dikatakan eksklusif apabila terdapat syarat yang ketat sehingga membatasi orang untuk ikut serta dalam proses seleksi kandidat, selain itu proses seleksi juga hanya melibatkan satu individu yakni ketua partai politik itu sendiri.

Selanjutnya, seleksi kandidat disebut tersentralisasi jika seleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai tingkat nasional. Sebaliknya, jika oleh partai cabang, dan disebut tertutup jika elit partai politik diberi hak penuh untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon. Selanjutnya prosesnya disebut informal manakala tidak ada standar norma yang dibakukan, atau prosesnya formal, jika ada standarisasi prosedur yang dibakukan dan eksplisit. Karakter inklusif, desentralisasi, dan formal menunjuk pada ukuran rekrutmen politik yang demokratis, dan jika sebaliknya disebut tidak demokratis Hazan dan Rahat (2006).

Pippa Norris & Lovenduski (1995) mengemukakan contoh praktik proses rekrutmen politik oleh partai politik yang diskriminatif, yakni dalam proses seleksi calon, kriteria tim seleksi menjadi bagian dari instrumen yang dapat digunakan untuk membuat adanya praktik diskriminasi. Berdasarkan hasil studi tersebut kedekatan pribadi ternyata memberikan pengaruh yang besar kepada peluang terpilihnya seseorang untuk diputuskan sebagai calon, terlebih jika di dukung dengan iklim partai yang bersifat feodalistik dan oligarkis.

Rekrutmen politik tahap akhir adalah pemberian suara oleh pemilih, atau menjadi domain pemilih. Terkait dengan peluang keterpilihan dalam Pilkada tidak lepas dari kepemilikan modal. Pasangan calon yang menguasai modal politik, modal sosial, modal ekonomi punya potensi untuk memenangi kontestasi. Ketiga jenis modal itu bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan, tetapi acapkali berkait satu dengan yang lain (Marijan, 2006: 89). Pentingnya penguasaan sumber daya (modal) dalam kontestasi Pilkada ini yang menjelaskan terdapatnya kecenderungan partai politik untuk mencalonkan orang yang punya kekuatan finansial (Haris, 2006: 54).

Kebijakan terhadap pengelolaan partai pun memiliki peran serta dalam mendorong pengembangan partai politik menjadi organisasi yang sehat, transparan dan akuntabel. Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan selogan restorasi dan semangat partai yang bersih tanpa mahar menjadi sebuah model baru terhadap upaya yang dibangun dalam menguatkan partai. Salah satu langkah partai yaitu dengan melakukan proses rekrutmen sumber daya manusia dan tata kelola partai politik menjadi organisasi yang akuntabel dan transparan. Hal ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mengukur kinerja serta membangun *trust* (kepercayaan) bagi masyarakat terhadap partai NasDem sebagai partai politik yang dapat dipercaya.

Partai NasDem sebagai partai baru sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi dari anggota dan masyarakat. Proses rekrutmen sumber daya manusia dan tata kelola organisasi yang baik dan transparan merupakan

langkah-langkah yang ditempuh dalam menguatkan partai NasDem menjadi partai yang bersih dan mampu dipercaya publik dan anggotanya. Dalam perkembangannya bahwa sumber daya manusia menjadi kunci dan tuntutan masa kini terhadap kinerja dan pencapaian dari suatu organisasi. Edralin (dalam Keban, 2004:16) mengemukakan bahwa tuntutan perubahan reformasi manajemen sumber daya manusia yang didasarkan pada prinsip *good governance* mengharuskan aparatur negara bekerja:

(1) berdasarkan visi strategis, (2) lebih akuntabel, (3) lebih transparan, (4) lebih responsif, (5) kompeten dan profesional, (6) lebih mengutamakan supremasi hukum dan keadilan, (7) bersifat desentralistik dan demokratis, (8) lebih partisipatif, (9) lebih berorientasi pada hasil dan (10) lebih berorientasi pada lingkungan, pasar, kemiskinan dan lain-lain.

Pada masa ini partai politik seringkali hanya fokus pada pencapaian kekuasaan namun lupa pada tujuan dan penguatan sumber daya manusia di internal partai sebagai instrumen dalam mendukung pencapaian visi dan misi partai. Signum Neuman (dalam Miriam Budiardjo, 1981:14) mengemukakan bahwa partai politik merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Partai NasDem sebagai partai baru mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu atau citra buruk dari partai politik yang selama ini hanya dijadikan kendaraan dalam mencapai kekuasaan sekelompok elit namun tidak berorientasi pada manajemen internal partai sebagai fondasi dalam membangun kekuatan dalam keberhasilan Visi Misi organisasi. Oleh karena itu partai NasDem mencoba membangun citra sebagai organisasi yang sehat dengan tata kelola yang baik melalui proses rekrutmen sumber daya manusia yang transparan, jujur dan akuntabel. Hal ini menjadi wujud nyata komunikasi politik partai NasDem yang disampaikan kepada masyarakat. Dapat dilihat dari

setiap pidato Ketua Umum Partai NasDem Bapak Surya Paloh yang selalu mengemukakan partai yang bersih dan tanpa mahar sebagai berikut :

“Kita sudah terjebak dengan slogan-slogan kosong, kita sudah terjebak dengan pendekatan kulit luar yang serba artifisial, kita menganggap semuanya, sepanjang memang akhirnya nanti kita memperoleh kemenangan. Artinya tidak ada tempat lagi di mana tempatnya untuk mengedepankan salah satu upaya *problem solving* menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan mufakat. Dimana? Pada tingkat apalagi kita temukan itu? Dimana? Di sektor apa kita temukan itu? Semuanya terjebak pada peran aktivisme termasuk permisivisme yang sarat dengan materialistik, artinya lebih menekankan pada individualistik Karena kita halalkan semua cara. Kita bertopeng seakan-akan kita lah sebenarnya orang yang pantas dihargai karena kita memakai topeng (Sihaloho, 2021)”.

Rekrutmen di partai politik menjadi satu proses yang sangat berperan untuk melahirkan kandidat-kandidat yang kompetitif, berkualitas, dan berintegritas. Namun perlu disadari bahwa proses rekrutmen membutuhkan tata kelola yang baik. Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan oleh pemberitaan tentang Herman HN pindah partai ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mana saat itu Herman HN masih berstatus sebagai anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPD PDIP Lampung Endro S Yahman mengatakan status keanggotaan Herman HN di PDIP sudah gugur. Menurutnya, Herman HN sudah melanggar Anggaran Dasar (AD) PDIP pasal 22, bahwa kader/anggota PDIP dilarang menjadi anggota Partai lain (Asrul, 2021).

Pindah pindah partai untuk mendapatkan peluang bukan hal tabu bagi sebagian orang. Fakta ini pun tercermin dari sikap Herman HN. Kepindaan mantan Wali Kota Bandar Lampung dua periode dari PDIP ke Partai NasDem tentu dapat disimpulkan sebagai kuda tunggangan menuju Pilgub 2024 mendatang. Herman HN menyebut partai terdahulu sudah tidak ada peluang untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat khususnya Lampung. Sehingga memilih pindah haluan agar terus dapat berkarya semasa hidupnya (Amri, 2021).

Mantan Walikota Bandar Lampung selama dua periode, Herman HN, tidak lagi menjadi kader PDIP. Herman HN kini berpindah partai ke NasDem. Tak tanggung-tanggung, Herman HN diberikan kepercayaan menjadi ketua DPW Partai NasDem menggantikan Taufik Basari pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 di kantor DPW NasDem Lampung dan disaksikan pengurus partai NasDem di 15 Kabupaten/Kota secara virtual (Asrul, 2021).

Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Ketua DPW NasDem Lampung ke Herman HN ini, diserahkan dari DPP ke pengurus lama DPW Partai NasDem Lampung. Penunjukkan Herman HN sebagai Ketua DPW Partai NasDem Lampung ini, berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor: 176-KPTS/DPP.NasDem/IX/2021 tertanggal 15 Juli 2021. Sebelum menerima SK Ketua DPW Partai NasDem Lampung, Herman HN yang sebelumnya dibesarkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, nampak mengenakan jas dan almamater berlogo Partai NasDem.

Penunjukkan Herman HN sebagai ketua DPW Partai NasDem Lampung tidak sesuai dengan AD/ART Partai NasDem Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 tentang Jenjang Pengkaderan Kader Partai terdiri dari :

1. Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan.
2. Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pengkaderan yang diselenggarakan oleh DPW tingkat Kabupaten/Kota.
3. Kader Madya yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pengkaderan yang diselenggarakan oleh DPW tingkat Provinsi.
4. Kader Paripurna yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pengkaderan yang diselenggarakan dewan pimpinan pusat.
5. Pedoman mengenai kaderisasi diatur melalui sebuah pedoman organisasi tentang kader oleh dewan pimpinan pusat.
6. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh dewan pimpinan pusat.

Permasalahan utamanya yakni peneliti tidak melihat jenjang pengkaderan yang dilakukan oleh Herman HN. Partai NasDem seharusnya melakukan tahapan tersebut ketika ingin mengangkat Herman HN sebagai Ketua DPW Partai NasDem Lampung. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan Pasal 24 tentang Dewan Pimpinan Wilayah yang menjelaskan syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Wilayah sebagai berikut :

1. Telah mengikuti pengkaderan paripurna;
2. Melaksanakan asas dan tujuan partai;
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai di tingkat wilayah; dan
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Muncul asumsi bahwa perpindahan Herman HN ke partai NasDem dilakukan untuk mendongkrak perolehan suara pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2024. Asumsi tersebut diperkuat dengan pernyataan pengamat bahwa apabila pindah ke partai NasDem, Herman HN akan mengantongi 10,5% suara dalam Pilgub 2024 mendatang. Partai NasDem memiliki 9 kursi di DPRD Lampung, sementara persyaratan pencalonan Gubernur minimal 20% dari kursi yang ada di DPRD artinya dengan 85 kursi total di DPRD Provinsi. Jika Herman HN berhasil menjadi ketua partai maka sudah berhasil mengantongi setengahnya. Apabila dilihat dari partai NasDem yang mengalami *devisit electoral* maka dengan pindahanya Herman HN akan memiliki karir politik yang baik (Sri, 2021).

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang membahas tentang rekrutmen kepemimpinan politik. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai rekrutmen politik yang melihat dari berbagai sudut pandang berbeda dengan penelitian saat ini, mulai dari fokus, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan menganalisis tentang rekrutmen Herman HN di partai NasDem. Berikut adalah beberapa penelitian serupa yang menjadi acuan peneliti:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Fokus penelitian
1.	Rosiyana (2013)	Rekrutmen Anggota Partai Politik PDIP dan PKS di Kecamatan Jebres Surakarta Tahun 2012	Fokus penelitian yakni meningkatkan pemahaman rekrutmen anggota partai politik, untuk meningkatkan pemahaman tentang tujuan partai politik, untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat partai politik di kecamatan Jebres Surakarta dalam proses rekrutmen anggotanya.
2.	Fajrina (2017)	Strategi Rekrutmen Partai Gerindra dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya	Fokus penelitian ini yaitu salah satu fungsi terpenting adalah rekrutmen politik yaitu sebuah seleksi anggota partai untuk mencetak seorang pemimpin berkualitas. Penelitian ini membahas tentang strategi rekrutmen oleh Partai Gerindra dalam melakukan kaderisasi
3.	Prakoso (2018)	Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik di Kabupaten Pati karena 8 dari 9 partai politik lebih memilih mengusung satu calon, sedangkan satu partai lainnya tidak dapat mengusung kandidat karena jumlah kursi yang dimiliki kurang.
4.	Herri (2018)	Oligarki Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah	Fokus Penelitian ini yaitu rekrutmen politik yang dilakukan partai politik hanya untuk melanggengkan oligarki.
5.	Andani dkk (2019)	Rekrutmen dan Kaderisasi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Oleh Partai Keadilan Sejahtera	Fokus penelitian ini bagaimana kaderisasi calon legislatif perempuan dalam pemilihan umum 2019 Oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ilir

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2021)

Penelitian ini membahas tentang rekrutmen partai politik di Kota Bandar Lampung. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini baik secara fokus penelitian tempat, teori yang digunakan dan calon independen yang akan diteliti. Penelitian ini akan memfokuskan kepada bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh partai NasDem yang bisa menjadikan Herman HN sebagai Ketua DPW Partai NasDem. Penelitian ini mengambil studi kasus di Kota Bandar Lampung alasannya kasus tersebut sedang hangat di perpolitikan elite politik yang ingin menunjang suara pada Pilgub di Provinsi Lampung selain menarik untuk terus dikembangkan secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat peneliti yaitu: Bagaimana Rekrutmen Kepemimpinan Politik Partai NasDem ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Rekrutmen Kepemimpinan Politik Partai NasDem.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi kajian Ilmu Politik, khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen kepemimpinan di partai politik.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta referensi bagi pembaca.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Oligarki

2.1.1 Pengertian Tentang Oligarki

Secara konseptual, istilah oligarki telah lama dikenal dalam studi politik. Istilah ini merentang dari jaman Yunani Kuno hingga era kontemporer sekarang. Pada *International Encyclopedia of Social Sciences*, Oligarki didefinisikan sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil”. Istilah tersebut diambil dari bahasa Yunani, “*Oligarchia*”, yang berarti pemerintahan oleh yang sedikit, terdiri atas kata *oligoi* (sedikit), dan *arkhein* (memerintah). Namun, pengertian singkat tersebut sangat problematis dan tidak memadai untuk mendefinisikan Oligarki. Hal itu karena masih menimbulkan keaburan makna mengenai Oligarki itu sendiri (Winters, 2011).

Apalagi bila itu disematkan hanya pada konsep “*minoritas yang menguasai mayoritas*”. Bila konsep oligarki didasarkan pada hal demikian, maka hampir setiap kekuasaan, pengaruh, atau pemerintahan, yang menempatkan adanya minoritas dalam memimpin, maka dapat disebut sebagai oligarki. Berdasarkan pemahaman tersebut maka, Soviet, kardinal Gereja, direksi perusahaan, bahkan demokrasi perwakilan itu sendiri dapat dikatakan sebagai oligarki, karena di dalamnya hanya sedikit orang yang memerintah. Padahal, dalam pengertiannya, yang dimaksud oligarki tidaklah sesederhana itu.

Seorang profesor di Northwestern University, Jefferey A. Winters, berusaha mengkonstruksi ulang pemahaman mengenai oligarki. Menurut Winters (2011), konsep oligarki penting untuk ditempatkan dalam dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan kekayaan material yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas. Dengan demikian, suatu kekuasaan yang oligarkis harus didasarkan pada bentuk kekuasaan yang susah dipecahkan dan jangkauannya yang harus sistemik. Menurut Winters, teorisasi oligarki dimulai dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula (Winters, 2011).

Meskipun dalam demokrasi, kedudukan dan akses terhadap proses politik dimaknai setara, akan tetapi kekayaan yang sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik pada golongan tersebut. Klaim ini didasarkan pada distribusi sumber daya material diantara anggota komunitas politik, demokrasi atau sistem lainnya yang memiliki pengaruh besar pada kekuasaan. Semakin tidak seimbang distribusi kekayaan material, akan semakin besar kekuasaan dan pengaruh orang kaya dalam motif dan tujuan politiknya. Dengan demikian, ketidaksetaraan yang besar dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan pengaruh politik (Hacker, 2010).

Klaim teoritik tersebut didasarkan pada hubungan yang erat antara finansial (kekayaan) dan kekuasaan yang menyebar dalam sistem politik manusia. Studi mengenai oligark dan oligarki memusatkan perhatian pada kuasa kekayaan dan politik yang spesifik di sekitar kuasa tersebut. Penekanannya ada pada dampak politik kesenjangan material terhadap “kesenjangan kondisi” yang membuat bentuk-bentuk kekuasaan dan eksklusi minoritas oligarkis berbeda dengan yang lainnya. Untuk itu,

menurut Winters, teori oligarki harus menjelaskan bagaimana kekayaan yang terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, dan masalah politik tertentu bagi mereka yang memilikinya. Selain juga harus peka terhadap bagaimana dan mengapa politik seputar kekayaan sebagai kekuasaan telah berubah seiring perkembangan waktu (Winters, 2011).

Berdasarkan fakta demikian, Winters memulai penjelasannya mengenai Oligarki dari apa yang dimaksud dengan Oligark. Winters mendefinisikan Oligark sebagai

“pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya”.

Berdasarkan definisi diatas, terdapat tiga hal yang saling bersangkutan paut, antara lain. Pertama, kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang berbeda dengan sumber daya kekuasaan lain yang berpusat pada minoritas. Kedua, penguasaan dan pengendalian sumber daya itu ditujukan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, definisi oligark tetap konsisten di berbagai zaman dan kasus. Sebelum menjelaskan oligarki sebagai sebuah sistem, Winters memperkenalkan konsep “pertahanan kekayaan”. Sepanjang perjalanan sejarah, kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusi ulang kekayaan tersebut. Ini dimaknai sebagai pengambilalihan sumber daya material dari oligark (Winters, 2011:30).

Oleh karena itu, maka dinamika politik para oligark selalu berhubungan dengan ancaman tersebut, dan bagaimana oligark mempertahankannya. Pertahanan kekayaan ini mencakup dua komponen, yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. Pada konsep ini, Winters mengetengahkan aspek penting dari oligarki, yaitu kekayaan menjadi sumber daya material bagi kekuasaan para oligark dan dinamika politik pertahanannya yang dikelola secara politis (Winters, 2011:34).

2.1.2 Tipe-tipe Oligarki

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa oligarki memiliki beragam bentuk tergantung dengan politik pertahanan kekayaan yang dijalankannya. Perubahan bentuk oligarki ini didasarkan pada ancaman kekayaan darimana ia berasal, misalnya apakah ancaman itu muncul dari kaum tak berpunya dibawah, dari samping yaitu antar oligark itu sendiri, atau dari atas yang berasal dari negara/kekuatan pemerintah. Beragam ancaman itu, membuat oligark membentuk pertahanan kekayaan dengan mengikuti konteksnya. Winters menyatakan bahwa, persamaan oligark sepanjang sejarah adalah bahwa kekayaan mendefinisikan, memberi kekuasaan dan mendatangkan ancaman kepada mereka. Yang beragam dalam sejarah adalah hakikat ancaman-ancaman itu dan cara oligark menanggapi ancaman untuk mempertahankan harta. Keragaman itu memunculkan tipe-tipe oligarki.

Untuk memperjelas pendapat tersebut, Winters membuat tipologi ideal mengenai oligarki. Menurutnya, semua oligarki dapat digolongkan berdasarkan empat ciri utama, yaitu kadar keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan yang menyokong hak milik atas harta dan kekayaan; keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintahan; sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan itu, apakah terpecah atau kolektif; dan oligark bersifat liar atau jinak (di mana penjinakan oleh pihak luar lebih umum serta lebih stabil daripada penjinakan diri sendiri (Winters, 2011).

Dari ciri di atas, Winters (2011) mengemukakan 4 (empat) tipe ideal dari oligarki, antara lain:

1. Oligarki Panglima (*Warring Oligarchy*)

Oligarki panglima yakni tipe oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa (kekerasan) secara langsung ada pada dirinya. Setiap oligark memiliki senjata untuk mendapatkan kekayaan. Ia memiliki tentara dan

berebut secara langsung sumber daya material dengan oligark lain. Dalam dunia seperti itu, perpecahan antar oligark berada di tingkat tertinggi, sehingga persekutuan menjadi tidak stabil. Konflik dan ancaman umumnya bersifat lateral antar oligark panglima. Dapat dikatakan di sini bahwa pengumpulan kekayaan dilakukan dengan cara penaklukan satu panglima ke panglima lain sehingga ancaman paling dominan terdapat pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima ini terjadi dari masa pra sejarah, Eropa zaman pertengahan, dan berakhir dengan keluarga yang berseteru di Pegunungan Apalachia (Winters, 2011:52).

2. Oligarki Penguasa Kolektif (*Ruling Oligarchy*)

Oligark jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Perbedaan mendasar antara oligarki panglima dengan oligarki penguasan kolektif terletak pada kadar kerja samanya. Dalam oligarki penguasa kolektif ini, para oligark bekerja sama untuk mempertahankan kekayaannya dan memerintah suatu komunitas. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah kolektif dilembagakan dalam suatu badan pemerintah yang isinya oligark semuanya. Secara historis, contoh dari bentuk oligarki penguasa kolektif bisa ditemui dari komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma, juga menurut Winters adalah praktek politik di Indonesia pasca Soeharto (Winters, 2011:52).

3. Oligarki Sultanistik (*Sultanistic Oligarchy*)

Bentuk oligarki terjadi ketika monopoli sarana pemaksaannya terletak pada satu tangan oligark. Hubungan antara oligark bersifat patron-klien terhadap oligark yang berkuasa tersebut. Oligarki jenis ini disebut sebagai oligarki sultanistik. Wewenang dan kekerasan hanya dikuasai oleh penguasa utama, sedangkan para oligark lainnya menggantungkan pertahanan kekayaan dan hartanya pada oligark tunggal tersebut. Para penguasa oligark mengalahkan kapasitas oligark di bawahnya, biasanya

dengan mekanisme alat kekerasan negara atau mencampurkan dengan sarana pemaksa individu. Para oligark bawahan yang tidak bersenjata kemudian mempertahankan kekayaan dengan menginvestasikan sebagian sumber daya yang dimilikinya kepada oligark sultanistik. Dengan itu, oligark penguasa berkewajiban melindungi oligark-oligark di bawahnya.

Singkatnya, oligarki sultanistik ada ketika terjadi monopoli sarana pamaksaan berada ditangan satu orang, bukan negara yang terlembaga yang dibatasi oleh hukum. Didalamnya marak hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu yang terkait dengannya. Namun penegakkan hukum tidak ada atau beroperasi sebagai sistem kekuasaan hukum yang bersifat pribadi. Salah satu contoh mengenai oligarki sultanistik ini pada rezim Soeharto di Indonesia (Winters, 2011:53).

4. Oligarki Sipil (*Civil Oligarchy*)

Oligarki yang sepenuhnya tak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligark menyerahkan kekuasaannya pada lembaga non-pribadi dan terlembaga dimana hukum lebih kuat. Oligarki jenis ini disebut dengan Oligarki Sipil. Karena hak milik dan pertahanan harta telah disediakan oleh negara, maka fokus oligark hanya pada pertahanan pendapatan, yaitu upaya untuk mengelak dari jangkauan negara untuk redistribusi kekayaan, misal melalui pajak progresif. Oligarki sipil tidak selalu bersifat demokratis dan melibatkan pemilu. Misalnya, Amerika dan India memang bersifat demokratis secara prosedural, tetapi di Singapura dan Malaysia bersifat otoriter. Dari beragam contoh itu, semuanya bersifat oligarki sipil (Winters, 2011:53).

Tipe ideal yang dibuat oleh Winters ini tidak statis, artinya dalam suatu wilayah yang memiliki satu tipe oligarki tertentu bisa memungkinkan berubah menjadi tipe oligarki yang lain. Hal itu terjadi dengan mengikuti

perkembangan situasi yang spesifik. Walaupun pada berbagai waktu dalam sejarah para oligark telah berkuasa langsung, mereka tak didefinisikan dengan peran dalam pemerintahan atau posisi pengusaha. Oligark adalah pelaku yang didefinisikan oleh sumber daya kekuasaan yang dimiliki dan dikuasai (Winters, 2011:58).

2.2 Tinjauan tentang Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin untuk mengubah serta memberdayakan perilaku yang dipimpin sehingga mereka mampu memimpin dirinya sendiri dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan pribadi. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi bawahan atau kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kepemimpinan dapat terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan dapat di artikan proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada pegawainya. Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penugasan karyawan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Adapun pengertian kepemimpinan Islam adalah cara-cara memimpin, mengatur, mengarahkan umat/rakyat yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam budaya perusahaan (*the corporate culture*), arah dan bentuk manajemen sebuah perusahaan atau organisasi sangat bergantung pada kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya (model kepemimpinan), guna mengantarkan perusahaan atau organisasi mencapai tujuan yang diimpikan.

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai target dan tujuannya, tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur, peraturan, standar operasi, sumber daya manusia atau infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, model kepemimpinan yang dijalankan seorang pemimpin juga akan menentukan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berapa banyak perusahaan yang bangkit, setelah memiliki manajemen kepemimpinan yang handal, dan berapa banyak perusahaan yang tumbang, karena ditinggalkan oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Seorang pemimpin diharapkan memiliki kemampuan mengarahkan dan memimpin perusahaan atau organisasi untuk maju dalam meraih tujuan kolektif yang diimpikan bersama. Kepemimpinan dipahami dalam pengertian sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang dan sebagai alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu dengan ikhlas. Hal ini tidak mungkin diwujudkan pemimpin tanpa adanya interaksi sosial yang baik dengan para pengikutnya. Sehingga, mereka akan bekerja sama layaknya sebuah tim yang solid guna mewujudkan impian bersama.

Kepemimpinan dipahami dalam pengertian sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang dan sebagai alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu dengan ikhlas. Hal ini tidak mungkin diwujudkan pemimpin tanpa adanya interaksi sosial yang baik dengan para pengikutnya. Sehingga, mereka akan bekerja sama layaknya sebuah tim yang solid guna mewujudkan impian bersama. Seorang pemimpin atau manajer adalah bagian dari perusahaan atau organisasi dan tidak bisa dipisahkan dari mereka. Oleh karena itu kepemimpinan pada hakekatnya adalah

- a. Proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- b. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama.
- c. Kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- d. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan.

Praktek kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya.

2.3 Tinjauan Tentang Partai Politik

Partai Politik (parpol) menurut Miriam Budiardjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju parpol menjadi ikhtiar yang penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih

teratur. Pendapat dan sikap yang bermacam-macam tersebut perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum.

Artikulasi pendapat dan sikap dari berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama digabungkan menjadi sebuah “penggabungan kepentingan” yang dalam suatu sistem politik merupakan input bagi pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya jika artikulasi pendapat dan sikap tersebut tidak terakumulasi dengan baik maka yang akan timbul adalah kompetisi kepentingan yang tak terkendalikan dan akhirnya akan menimbulkan anarki. Dengan kata lain, parpol bertugas mengatur kehendak umum yang kacau. Partai-Partai menyusun keteraturan dari kekacauan para pemberi suara yang banyak jumlahnya itu.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Djenal Hoesen Koesoemahatmadja (1978:79), bahwa tanpa organisasi partai tidak mungkin akan ada:

1. Penyatuan pernyataan prinsip.
2. Evolusi yang tertib dalam merumuskan kebijaksanaan.
3. Pelaksanaan yang teratur daripada alat konstitusional yang berupa pemilihan parlemen, dan seterusnya.

Sebaliknya besar kemungkinan akan timbul (jika tidak ada organisasi Partai);

1. Gerombolan-gerombolan dan komplotan-komplotan liar.
2. Permintaan-permintaan dan petisi kepada pemerintah.
3. Persetujuan-persetujuan rakyat.
4. Pernyataan-pernyataan dan protes-protes.

Pengertian partai politik sebelum beranjak pada pengertian parpol, terlebih dahulu dikemukakan pengertian partai itu sendiri. Sigmund Neuman (1982:59) menjelaskan bahwa menjadi partai dari sesuatu selalu berarti mengidentifikasikan diri dengan suatu kelompok dan membedakan diri dari

kelompok lainnya. Setiap partai pada intinya menunjukkan adanya persekutuan (*partnership*) dengan suatu organisasi dan memisahkan diri dari organisasi lainnya dengan suatu program khusus. Penjelasan ini menunjukkan bahwa definisi partai itu sendiri menunjukkan adanya suasana demokratis.

Sebuah partai dapat ada dengan sungguh-sungguh jika sekurang-kurangnya ada satu kelompok lain yang bersaing (oposisi), yang membedakan partai dengan organisasi lainnya adalah bahwa partai mempunyai program khusus yang tidak dimiliki organisasi lain, seperti ikut dalam kampanye yang bertujuan mempengaruhi kebijakan. Selanjutnya Sigmund Neumann masih tentang parpol menegaskan bahwa: parpol adalah organisasi yang artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Parpol merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Dari pendapat di atas, parpol diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedaulatan politik melalui kekuasaan yang diperoleh itu melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Thomas H. Stevenson (Koesoemahatmadja, 1978:80) bahwa parpol adalah kelompok orang yang terorganisir untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan programnya dan agar anggota-anggotanya ditempatkan dalam bidang-bidang pemerintah. Jadi parpol selain mengawasi jalannya pemerintahan yang sesuai dengan program partai juga berusaha agar anggota partai masuk dalam jajaran birokrasi pemerintahan. Untuk lebih memahami pengertian parpol, berikut dikemukakan

ciri-ciri parpol yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (1992:114-115), yaitu:

1. Parpol berakar dalam masyarakat lokal, dalam arti bahwa Partai mempunyai cabang-cabang di setiap daerah;
2. Melakukan kegiatan secara terus menerus, dengan penyusunan program kegiatan yang berkesinambungan;
3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan;
4. Ikut serta dalam pemilu;
5. Mempunyai landasan ideologi; dan
6. Sebagai Pembina kesadaran nasional dan mengarahkan massa untuk mencapai kemerdekaan (dalam masyarakat yang tengah dijajah).

Fungsi–fungsi parpol Miriam Budiardjo (2006:163-164), menjelaskan mengenai fungsi parpol, yaitu:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik
3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik
4. Partai sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

2.4 Kerangka Pikir

Ichlasul Amal (1988) mengemukakan bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai suatu organisasi secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat (partisipasi politik), mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai. Karena itu menurutnya partai politik dalam pengertian moderen dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi

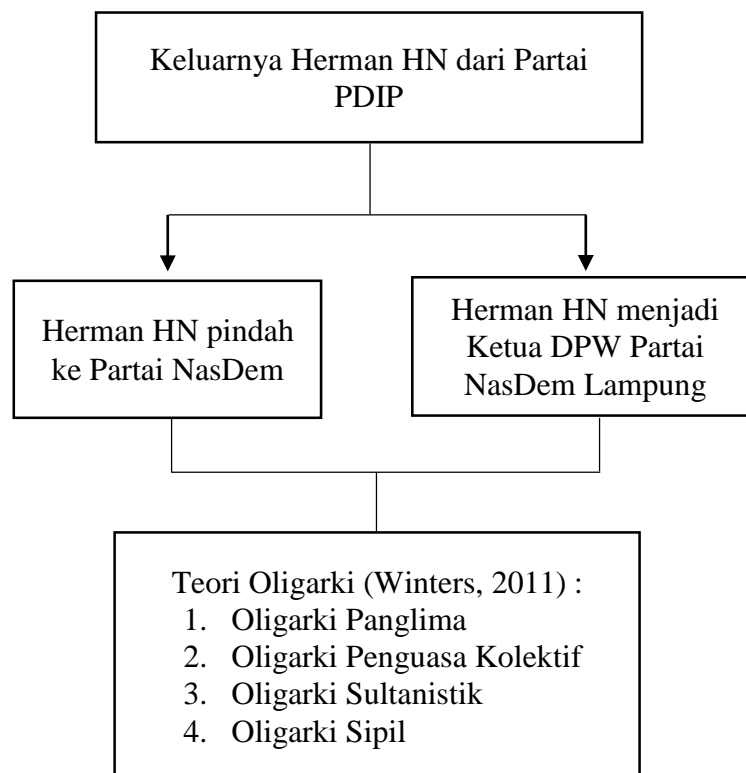
jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga bisa mengawasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.

Salah satu fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi rekrutmen politik (Norris, 2006: 89), fungsi ini merupakan fungsi khas partai politik. Bagi partai politik, calon yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik (Katz, 2001) bahwa rekrutmen politik menunjukkan tipologi partai. Jadi, apakah sebagai partai massa, kader, *catch-all*, kartel atau *business-firm* dapat dilihat dari bagaimana rekrutmen politik dilakukan (Katz, 2001; Pamungkas, 2009: 37). Adapun yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Amandemen UUD 45 mengatur rekrutmen politik sebagai ranah partai politik. Pasal 6 menegaskan partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 22E ayat (3) menegaskan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, sebagai peserta pemilu partai politik adalah institusi yang dalam Undang-Undang Pemilu diberi tugas mengusulkan siapa yang menjadi calon anggota DPR dan DPRD.

Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan oleh pemberitaan tentang Herman HN pindah partai ke NasDem yang mana saat itu Herman HN masih berstatus sebagai anggota dari PDIP. Menurut Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Lampung Endro S Yahman mengatakan status keanggotaan Herman HN di PDIP sudah gugur. Menurutnya, Herman HN sudah melanggar Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan pasal 22, bahwa kader/anggota PDI Perjuangan dilarang menjadi anggota Partai lain.

Mantan Walikota Bandar Lampung selama dua periode Herman HN tidak lagi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melainkan kini berpindah partai ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Herman HN tak tanggung-tanggung diberikan kepercayaan menjadi ketua DPW Partai NasDem menggantikan Taufik Basari pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 di kantor DPW NasDem Lampung dan disaksikan pengurus partai NasDem di 15 Kabupaten/Kota secara virtual. Penelitian ini membahas mengenai rekrutmen kepemimpinan politik partai NasDem atas penetapan Herman HN Sebagai Ketua DPW Partai NasDem. Menurut Peneliti Herman HN pindah ke partai NasDem untuk mendulang agar suara di 2024 Herman HN bisa menang dalam Pemilihan Gubernur di Provinsi Lampung dan menjadi strategi menaikkan popularitas partai NasDem. Penelitian ini teori yang digunakan adalah teori oligarki menurut Winters. Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2021)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan (*descriptive research*) yaitu penelitian yang berupaya mengetahui dan memahami beberapa hal diantaranya untuk mengetahui bagaimanakah rekrutmen kepemimpinan yang dilakukan partai NasDem. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial (Creswell, 2015).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna, makna disini adalah yang sebenarnya data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, peneliti memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan masalah yang dilihat. Selain itu alasan peneliti tidak menggunakan metode kuantitatif dikarenakan bukan

meneliti yang berfokus pada sampel tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan bukan juga menggunakan mix method yang menggunakan atau menggabungkan kedua pendekatan penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif (Sugiono, 2010).

Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti juga diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan dan kejadian dalam konteks yang diteliti. Penelitian dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa rekrutmen kepemimpinan politik partai NasDem (Studi kasus penetapan Herman HN sebagai ketua DPW NasDem).

3.2 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Patton (1990) dalam Poerwandari (2013) yaitu *“Qualitative inquiry is rife with ambiguities. There are purposeful strategies instead of methodological rules. There are inquiry approaches instead of statistical formulas. Qualitative inquiry seems to work best for people with a high tolerance for ambiguity”*. Jadi, penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah.

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian, maka penelitian ini berfokus pada fenomena perrekrutan dan pengangkatan Herman HN sebagai ketua DPW partai Nasdem dengan menggunakan teori oligarki menurut Winters (2011) dengan kecenderungan menggunakan konsep oligarki sultanistik sebagai pisau bedah.

3.3 Informan

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan prosedur *purposive* agar relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2011). Guna memenuhi kebutuhan informasi pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama informan sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Alasan
1.	Herman HN	Ketua DPW Partai NasDem Lampung	Peran sebagai anggota partai PDIP yang pindah ke partai NasDem
2.	Fauzan Sibron	Sekretaris DPW Partai NasDem	Peran sebagai anggota yang melihat digantikan posisinya oleh Herman HN
3.	Dedi Damhuri	Kepala Kesekretariatan DPW NasDem	Peran sebagai anggota menanggapi pengangkatan Herman HN
4.	Hadi Kusuma	Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Lampung Utara	Peran sebagai anggota menanggapi pengangkatan Herman HN
5.	Budi Harjo	Akademisi	Peran sebagai akademisi yang melihat fenomena tersebut
6.	Septedi	Masyarakat	Peran sebagai masyarakat yang melihat sikap Herman HN
7.	Mariati	Masyarakat	Peran sebagai masyarakat yang melihat sikap Herman HN

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2021)

3.4 Jenis Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini yakni:

1. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa perantara. Peneliti menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara, baik terstruktur ataupun mendalam (*in depth interview*) dengan berbagai informan yang sudah dipaparkan pada tabel 2.
2. Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, melainkan lewat studi kepustakaan atau studi dokumentasi data tambahan yang tidak bisa didapat melalui metode awal. Data sekunder penelitian ini meliputi :
 - a. AD/ART Partai NasDem Tahun 2019 pada pasal 13 tentang Jenjang Pengkaderan Kader Partai.
 - b. Pasal 24 tentang Dewan Pimpinan Wilayah.
 - c. Surat Keputusan (SK) nomor: 176-KPTS/DPP.NasDem/IX/2021 tertanggal 15 Juli 2021 dilantiknya Herman HN sebagai Ketua DPW Partai NasDem.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan seakurat mungkin

terkait variabel yang dikaji sehingga Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Riduwan (2010: 51) wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk menjawab secara lisan pula, ciri utama wawancara adalah langsung bertatap muka (*face to face relationship*) antara pencari informasi (*interviewer/information hunter*) dengan sumber informasi. Peneliti melakukan wawancara tatap muka. Dengan demikian Peneliti dapat mengetahui informasi ataupun hal-hal yang tersembunyi dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber. Peneliti melakukan metode wawancara ini dengan menggunakan panduan wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara (Sudaryono, 2017:219). Pada penelitian ini peneliti mendapatkan dokumen dari Partai NasDem yaitu AD/ART Partai NasDem Tahun 2019 pada pasal 13 tentang Jenjang Pengkaderan Kader Partai, Pasal 24 tentang Dewan Pimpinan Wilayah, Surat Keputusan (SK) nomor: 176-KPTS/DPP.NasDem/IX/2021 tertanggal 15 Juli 2021 dilantiknya Herman HN sebagai Ketua DPW Partai NasDem, dan SK Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 45-Kpts/DPP-NasDem/I/2022.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul yaitu peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Taylor, 1995) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya untuk dipersiapkan pada proses selanjutnya. Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan memeriksa kembali transkrip wawancara, apakah masih terdapat kesalahan dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, Peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2014: 248). Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan

menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melalui prosedur reduksi data, display (penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dan Huberman, 1992:17) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan finalnya dan diverifikasi. Reduksi data memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian membuang data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. Display Data (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Misalnya data yang mendukung penelitian dari hasil yang ada di lapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Catatan-catatan penting di lapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan Peneliti pada penyajian data selanjutnya adalah data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna, dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan Peneliti dalam verifikasi data adalah menggunakan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan teori yang Peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian ini. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan.

Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data. Setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian maka data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

1. Triangulasi Data

Menurut Zuldafrial (2012:89) “keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri”. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses triangulasi Menurut Afifuddin (2009:143) triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.ada beberapa jenis triangulasi data yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atas yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerja sama.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan dokumentasi, dan kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Partai NasDem

4.1.1 Sejarah NasDem

Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berasaskan Pancasila yang didirikan pada 1 Februari 2011 di Jakarta dan secara resmi dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Melalui sebuah rapat koordinasi nasional (rakornas), partai ini berdiri sebagai salah satu partai baru di Indonesia (detik.com). Partai NasDem Terbentuk 6 Agustus 2016, pada awalnya Partai NasDem merupakan sebuah ormas yaitu Nasional Demokrat yang di dirikan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang diakibatkan oleh kegelisahan terhadap bangsa indonesia yang semakin merosot ormas Nasional Demokrat ini di deklarasikan pada 1 Februari 2010 oleh 45 deklarator tokoh nasional di Istora Senayan Jakarta.

Terdapat beberapa faktor yang terus mendorong lahirnya Partai NasDem diantaranya ada desakan dari beberapa kalangan untuk segera membentuk partai, lahirnya UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, serta upaya dari partai lain yang mencoba menjegal partai baru lahir. Ketiga faktor tersebut kemudian menstimulasi beberapa kader Ormas Nasional Demokrat untuk mendirikan Partai NasDem dengan dukungan penuh Surya Paloh. Kongres I Partai NasDem yang digelar pada 25-26 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem. Kongres I Partai NasDem diikuti oleh seluruh 33 Dewan Pimpinan

Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem), Kongres I Partai NasDem saat itu diikuti 66 orang yang mewakili 33 DPW, 994 orang mewakili 497 DPD, 9 orang mewakili Majelis Tinggi, dan 2 orang anggota Dewan Pakar. Selain peserta yang memiliki hak suara, Kongres juga dihadiri 800 orang peninjau yang datang dari seluruh penjuru Indonesia (Partai NasDem, 2016).

Berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini. Satu di antaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Kongres juga memberi mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan dan perangkat partai. Amanah kongres ini harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum, selain itu Kongres juga memberi mandat penuh kepada Dewan Pimpinan Pusat di bawah kepemimpinan Surya Paloh untuk menetapkan strategi dan kebijakan guna memenangi Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Partai NasDem, 2016).

Partai NasDem merupakan satu-satunya partai baru yang lolos verifikasi tahap administrasi oleh KPU. Partai NasDem mengajukan berkas administrasi kepartaian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan 46 parpol yang mengajukan diri ikut Pemilu 2014. Pada verifikasi awal terdapat 34 parpol yang lolos dari total 46 parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2014 di KPU. Setelah melakukan verifikasi administrasi atas 34 parpol yang berniat ikut Pemilu 2014, KPU menyatakan ada 16 partai yang lolos maju ke tahap verifikasi faktual dan 18 partai gugur. Parpol yang lolos verifikasi administrasi, berhak mengikuti verifikasi faktual.

Verifikasi faktual adalah tahap verifikasi langsung KPU ke lapangan untuk mengecek infrastruktur parpol di setiap daerah disesuaikan dengan hasil

verifikasi administrasi. Pada tanggal 7 Januari 2013 Partai NasDem memenuhi semua syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi, dengan bukti-bukti, antara lain: Memiliki kepengurusan seperti Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Jenderal, memiliki lebih dari 30% anggota perempuan, memiliki kantor yang digunakan sampai akhir Pemilu 2014. Partai NasDem berhak mengikuti pemilu untuk pertama kalinya pada 9 April 2014 (Partai NasDem, 2016).

Partai NasDem juga mendapatkan nomor urut satu dalam undian no urut partai peserta pemilu legislatif pada tahun 2014, hal ini menjadi sejarah bagi partai NasDem sebagai partai baru yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti kontestasi dalam pemilihan legislatif tahun 2014. Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 Partai NasDem yang merupakan partai baru yang mengikuti pemilihan umum di Indonesia bersaing dengan dua belas partai lain peserta Pemilu legislatif. Partai NasDem memperoleh hasil persentase sejumlah 6,72% suara. Suara terbanyak diperoleh oleh PDI Perjuangan dengan 18,95%, diikuti Partai Golkar dengan 14,75%, dan Partai Gerindra dengan 11,81 % (KPU, 2016).

Awal dibentuknya dewan pengurus daerah Partai NasDem Kota Tidore Kepulauan tidak terlepas dengan persyaratan pembentukan partai politik yang di muat dalam Undang Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang mewajibkan partai politik memiliki dewan pengurus partai tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembentukan DPD partai Partai NaDem Kota Tidore Kepulauan bersamaan dengan pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan wilayah Partai NasDem Provinsi Maluku Utara tanggal 28 Februari 2013 di Hotel Amarah Kota Ternate. Oleh Ketua Umum Surya Paloh. Pada tahun 2014 Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan kunjungan kerja ke DPD Kota Tidore Kepulauan dimana pada kunjungan tersebut melakukan konsolidasi serta peresmian kantor DPD yang berkedudukan di Kelurahan Toma goba. Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Tidore Kepulauan Partai NasDem memperoleh Tiga

kursi di DPRD kota Tidore Kepulauan dimana tiga kader partai NasDem berhasil memperoleh suara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Legislatif dimana salah satu berhasil menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPRD kota Tidore Kepulauan. Ketiga kader tersebut adalah Malik Hi Muhammad, Abdullah M. Naser dan Muchtar Jumati.

4.1.2 Visi Misi dan Makna Logo

1. Visi

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

2. Misi

1. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan. Berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.
2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.

3. Menjadikan Budaya Gotong Royong Sebagai Karakter Bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotongroyong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global. (Anggaran dasar Partai NasDem pasal 4-5).

3. Makna Logo Partai



Gambar 2. Logo Partai NasDem

(Sumber : Partai NasDem, 2016)

Lambang Partai NasDem berbentuk lingkaran biru yang dibalut dengan warna jingga. Lambang yang sederhana bertujuan agar mudah diingat dan digambar sebagai simbol gerakan perubahan, lingkaran biru merupakan simbol perputaran yang dinamis sebagai semangat dan harapan baru, keterbukaan, dan ketegasan dengan memiliki tujuan nyata. Balutan warna jingga yang membentuk seperti tangan memeluk merupakan simbol dari kebersamaan, keutuhan dalam bergerak, dan semangat pembaruan yang siap menampung aspirasi (Partai NasDem, 2016).

4.1.3 Platform Partai NasDem dan Garis Perjuangan

1. Platform Partai NasDem

Partai NasDem berazaskan pada Pancasila Partai NasDem juga mempunyai doktrin perjuangan yaitu Restorasi Indonesia yaitu suatu gerakan perubahan menuju Indonesia baru. Restorasi Indonesia mengandung arti suatu proses untuk mengembalikan, memperbaharui, mencarahkan, menata kembali, dan memperbaiki kondisi kondisi dalam perspektif jangka panjang yang terjadi dari dalam sistem itu sendiri dan dilakukan oleh seluruh komponen bangsa (Buku Putih Restorasi Indonesia, 2010 : 19). Inti dasar dari hakekat Restorasi Indonesia yang di gagas oleh Nasional Demokrat adalah gerakan moral yang kembali pada roh dan semangat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Ada enam esensi pokok dari Restorasi Indonesia :

1. Membangun kesadaran umum bahwa banyak hal yang keliru sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia berpotensi mengancam keberlangsungan berbangsa dan bernegara.
2. Membangun kesadaran umum bahwa perlu segera dilakukan perbaikan di bidang moral, etika, sikap, integritas, dan solidaritas.
3. Membangun kehidupan politik yang bertanggung jawab.

4. Membangun sistem ekonomi partisipatif atau emansipatif yang berkeadilan.
5. Merevitalisasi budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat.
6. Membangun disiplin nasional sebagai modal dasar melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Restorasi Indonesia juga mempunyai visi dan misi. Visi dari Restorasi Indonesia adalah “terwujudnya kemerdekaan Indonesia seutuhnya, dalam rangka membangun masa depan bangsa yang maju dan sejahtera dalam wadah NKRI yang kuat, berwibawa dan disegani dunia internasional.” Sedangkan misi dari Restorasi Indonesia adalah “memperjuangkan perubahan mendasar untuk membangun sistem politik yang menjunjung tinggi etika dan solidaritas, menggerakkan ekonomi emansipatif dan partisipatif, serta menumbuh – kembangkan budaya gotong royong.” (Buku Putih Restorasi Indonesia, 2010 : 21)

2. Garis Perjuangan

Agenda Restorasi diimplementasikan ke dalam tujuh belas butir *platform* perjuangan, mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. (Buku Putih Restorasi Indonesia, 2010. 23). Tujuh belas *platform* perjuangan NasDem terdiri dari:

1. Mengembalikan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa.
2. Revitalisasi kelembagaan politik dan ketatanegaraan.
3. Memperkuat politik luar negeri.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.
5. Membangun pertanian dan mewujudkan kedaulatan pangan.
6. Mengujudkan kedaulatan energi.
7. Menata kembali pengelolaan sumberdaya alam nasional.
8. Membangun industri berbasis IPTEK dan sistem inovasi Nasional.
9. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

10. Mengujudkan layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi semua.
11. Mewujudkan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau bagi semua.
12. Mengelola pertumbuhan penduduk mewujudkan keluarga kecil sejahtera, pengentasan kemiskinan, dan mengoptimalkan peran wanita dan generasi muda.
13. Mengujudkan kerukunan hidup antar-umat beragama.
14. Mengujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
15. Membangun kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.
16. Revitalisasi sistem perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pengelolaan APBN.
17. Mewujudkan birokrasi profesional dan bersih.

4.1.4 Platform Partai NasDem dan Garis Perjuangan

Negara diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat. Merdeka yang kami maksud berarti kebutuhan rakyat terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik, indah didengar, namun tidak pernah mewujudkan. Di sinilah Negara Indonesia yang merdeka, memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhi hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar.

Kita patut berbangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan kediktatoran. Namun, pada saat yang sama, reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas ke mana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi berjalan tanpa bimbingan.

Ideologi politik tanpa program politik yang konsisten dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat konstitusional nya. Kami menolak demokrasi yang sekadar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya melahirkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik. Kami menolak negara yang meninggalkan perannya dalam pemenuhan hak warga negara.

Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut satu masa depan yang gemilang dengan keringat dan tangan sendiri. Kami berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Kami berdiri untuk membangun politik warga negara, keberagaman sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia.

Kami mengusung mandat konstitusi untuk membangun satu negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Partai NasDem lahir sebagai keharusan sejarah. Kami lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas kekosongan politik gagasan pascareformasi. Kami berdiri tegak dengan semangat kebangsaan yang kuat, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat melalui Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Partai NasDem adalah perwujudan dari nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan yang demokratis seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara

bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulan internasional. Kami persembahkan Partai NasDem untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk bangsa dan tanah air yang kami cintai hingga akhir hayat.”<http://partaiNasDem.id>.

4.1.5 Bentuk Pendidikan Politik Partai NasDem

Bentuk pendidikan politik Partai NasDem:

1. Partai menjalankan pendidikan politik secara eksternal dan internal.
2. Pendidikan politik eksternal diperuntukkan untuk seluruh Warga Negara Indonesia berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.
3. Pendidikan politik internal berupa materi pengkaderan internal sesuai dengan jenjang dalam sistem kaderisasi.

Salah satu pendidikan politik Internal partai NasDem adalah Sekolah Legislatif. Sekolah legislatif ini di khususkan kepada kader Partai NasDem yang berada di DPR, DPRD baik provinsi maupun di kabupaten dan kota. yang tujuannya adalah memberi pembelajaran politik terhadap para kader terkait tujuan partai dan pemahaman terkait tugas dan fungsi dari legislatif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bersungguh-sungguh mengabdikan kepada masyarakat. Surya Paloh menuturkan Sekolah legislatif ini untuk mewujudkan harapan rakyat melalui aktualisasi legislator yang efektif dan berwibawa dalam rangka mencapai tujuan negara. Serta diperuntukkan secara khusus untuk memberikan tambahan wawasan dan referensi sebagai anggota dewan.

Pelaksanaan pendidikan politik dilakukan setelah sekolah legislatif kader dilantik menjadi anggota legislatif pelaksanaan dilakukan oleh DPP dan DPD seluruh Indonesia dengan menghadirkan pemateri yang kompeten di

bidangnya. Adapun materi yang diajarkan dalam sekolah legislatif diantaranya:

1. Kelembagaan negara dan sistem parlemen negara.
2. Sistem desentralisasi : prinsip-prinsip hubungan pusat daerah dan hubungan Eksekutif Legislatif.
3. Misi perjuangan konsitusionalitas Partai NasDem :agenda restorasi Indonesia.
4. *Positoning* Fraksi Partai NasDem sebagai Fraksi Pemerintah
5. Visi dan Misi perjuangan presiden terpilih 2014-2015
6. Prosedur kerja kelembagaan DPRD
7. System kerja pendukung : ke protokol, Administratif, dan keahlian
8. *Team Building* citra busana dan *Table Manner*

4.1.6 Struktur Organisasi Partai NasDem

Tabel 3. Struktur Organisasi Partai NasDem

Jabatan	Nama
Ketua	Herman HN
Sekretaris	Fauzan Sibron
Bendahara	Tampan Sujarwadi
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Aryanto Yusuf
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan	H. DIPL. INGB. Mofaje S. Carofeboka
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik	Heru Listianto
Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif	Nuril Anwar
Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif	Nessy Kalviya

Wakil Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan	Budi Yuhanda
Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Penggerak Komunitas	A. Fachruddin
Wakil Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial	Rahmawati Herdian
Wakil Ketua Bidang Digital dan Siber	Pujiono
Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik	Rakhmat Husein
Wakil Ketua Bidang Ekonomi	Rio Gunawan
Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Abdul Gholib
Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat	Iskandar Zulkarnain
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja	Misgustini
Wakil Ketua Bidang Kesehatan	Asih Patwanita
Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak	Sahyana
Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Amrullah Ahmad El Hakim
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	M. Yunus
Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Industri Kreatif	Sahanah
Wakil Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa	Kenedi Danial
Wakil Ketua Bidang Maritim	Yuria Putra Tubarad
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	Zainal Abidin
Wakil Ketua Bidang Energi dan Mineral	Trio Guna Sandra

Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup	Ichwanto M.Nuch
Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang	Garinca Reza Pahlevi
Wakil Ketua Bidang Migran	Devita Komalasari
Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Infrastruktur	Mardiana
Wakil Sekretaris Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis	Arief Tritia Hatang
Wakil Sekretaris Bidang Ideologi, Organisasi Kaderisasi	Romi Robbson Marpaung
Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu	Febrio Martha Mustafa
Wakil Sekretaris Bidang Umum dan Administrasi	Erika Novalia Sani
Wakil Bendahara Pengelolaan Dana Aset	Rita Purnamawaty
Wakil Bendahara Penggalangan Aset	Rosianti. (Riduan)

(Sumber : Partai NasDem, diolah oleh peneliti)

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik simpulan mengenai Rekrutmen Kepemimpinan Politik Partai NasDem (Studi Kasus Penetapan Herman HN Sebagai Ketua DPW Partai NasDem) sebagai berikut :

Fenomena perekrutan dan pengangkatan Herman HN sebagai ketua DPW Partai NasDem cenderung oligarki sultanistik yang masih berperan besar secara pribadi dalam pelaksanaan kekuasaan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pola relasi patron-klien antara Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem dan Herman HN selaku mantan Walikota Bandar Lampung. Oligarki sultanistik yang di dalamnya marak hubungan patron-klien dan kewenangannya dikuasai oleh penguasa yang memiliki kestabilan posisi sebagai oligarki. Herman HN sebagai elite politik di Lampung sudah banyak memiliki prestasi dan memiliki kekuatan memobilisasi kader sehingga tak butuh waktu lama Herman HN bisa menjadi Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung. Lemahnya sistem rekrutmen anggota partai politik. Sebab, pada tataran praksis, pragmatisme menjadi hierarki tertinggi yang diusung parpol dibanding mengemban tugas luhur dan mulia serta sikap idealisme sebagai partai politik.

6.2 Saran

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar mekanisme kepengurusan dan pengelolaan partai menjadi makin baik, pengaturannya perlu melengkapi dan menyempurnakan AD/ART dan peraturan perundang-undangan lainnya dan konsistensi dalam menjalankan aturan-aturannya.
2. Pentingnya menghadirkan aturan main yang mendukung penguatan idealism, profesionalisme, dan kemandirian partai bahwa kaderisasi akan amat membantu partai dalam menjaga idealisme dan visi misi partai agar menghindari perilaku tidak tepat dari elite maupun kader partai yang meruntuhkan sendi-sendi kehidupan politik demokratik. Dengan cara memberikan motivasi melalui pelatihan kader secara berkala untuk menumbuhkan rasa loyalitas, idealisme, dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibrahim Abu Sin. (2008). *Manajemen Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amri, Syaiful. (2021). *Goodbye PDIP, Herman HN Ngaku Tak Ada Kesempatan di Partai Lama*. Diakses melalui <https://tanggamus.pikiran-rakyat.com/politika/pr-2042761025/goodbye-pdip-Herman-hn-ngaku-tak-ada-kesempatan-di-partai-lama>.
- Asrul, 2021. *Berjas Biru, Herman HN resmi dilantik jadi Ketua DPW NasDem Lampung*. Diakses melalui <https://m.lampost.co/berita-berjas-biru-Herman-hn-resmi-ketua-dpw-NasDem-lampung.html>.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Bungin, Burhan. (2012). *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Clara, Rosa Pudjiyogyanti. (1991). *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djojosoekarto, A., & Sandjaja, U. (2008). *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia: Model, Strategi, dan Praktek*. Partnership for Governance Reform dan Strategic Transformation Institute.
- Firman, Noor. (2019). *Problem Oligarki dan Solusinya*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1459765/18/problem-oligarki-dan-solusinya?showpage=all>.
- Fitriyah, F. (2020). *Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1-17.)

- Haris, S. (2006). *Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada Langsung 2005*. In S. Nuryanti (Ed.), *Analisis Proses dan Hasil Pilkada Langsung 2005* (pp. 47–68).
- Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2006). *Candidate Selection: Methods And Consequences*. dalam *Richard S. Katz and William Crotty*. *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publications.
- Jeffrey A. Winters. (2011). *Oligarki terj.*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kadir, A. G. (2014). *Dinamika Partai Politik Di Indonesia*. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132-136.)
- Koesoemahatmadja. (1978). *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau dari Segi Sejarah*. Bandung : Alumnus.
- Keban, Y. (2004). *Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM PNS di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 8 Nomor 2. Magister administrasi Publik Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- (KPU.go.id, 2020)
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marijan, K. (2006). *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Diterbitkan bersama Pustaka Eureka [dan] PusDeHAM.
- Nahliwati, Ridha. (2018). *Gaya Kepemimpinan Herman HN Dalam Pandangan MUI Kota Bandar Lampung*.
- Neumann, Sigmund. (1982). *Modern Political Parties: Comparative Politics*. London : The Free Press of Glencoe.
- Norris, P. (2006). *Recruitment*. dalam *Richard S. Katz and William Crotty*. *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publications.
- Partai Nasdem. (2021). *Sejarah Partai Nasdem*.
- Ramadlan & Wahyudi. (2016). *Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semua Pemilukada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional*. *Jurnal Politik Indonesia Science Review*. Vol.1 No. 2.
- Sihaloha, Markus Junianto. (2021). *Surya Paloh: Banyak Parpol di Indonesia Terjebak Slogan Kosong dan Halalkan Segala Cara*. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/politik/817589/surya-paloh-banyak-parpol-di-indonesia-terjebak-slogan-kosong-dan-halalkan-segala-cara>.

- Pamungkas, Sigit, & Parlindungan, U. (2011). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sri. (2021). *Pengamat: Jika Pindah NasDem Herman HN Kantongi 10,5 Persen Tiket Pilgub 2024*. Diakses melalui <https://www.kupastuntas.co/2021/10/07/pengamat-jika-pindah-NasDem-Herman-hn-kantongi-105-persen-tiket-pilgub-2024>)
- Sukmadinata. (2009). *Landasan Psikologi dan Proses Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.